

INTISARI

Upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk mengatasi masalah pembangunan seperti ketertinggalan dan ketimpangan adalah dengan percepatan pembangunan ekonomi melalui rencana pembangunan Kawasan Strategis Tanjung Berikat. Rencana tersebut sudah ditetapkan sejak tahun 2011 di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Tengah dengan menetapkan Kawasan Tanjung Berikat sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Akan tetapi pada Perubahan RTRW di tahun 2019, Kawasan Tanjung Berikat tidak lagi ditetapkan sebagai KSK. Perubahan kebijakan ini memiliki resiko yaitu gagalnya pembangunan Kawasan Tanjung Berikat. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan terhadap status Kawasan Strategis Tanjung Berikat pada perubahan RTRW Kabupaten Bangka Tengah dan menggambarkan implikasi indikatif jika Kawasan Tanjung Berikat tidak jadi dibangun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model teorisasi deduktif kualitatif dan eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan terhadap status Kawasan Strategis Tanjung Berikat pada perubahan RTRW Kabupaten Bangka Tengah dipengaruhi oleh perubahan regulasi dan keterbatasan kewenangan yang menyebabkan kegagalan program. Kondisi tersebut merubah opini Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Faktor lainnya adalah adanya kompetisi, *negotated agreement*, *superior jurisdiction*, nilai politik dan nilai administratif. Jika kawasan Strategis Tanjung Berikat tidak jadi dibangun, maka diindikasikan akan berdampak negatif pada rendahnya ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; tertinggalnya pembangunan dan perekonomian Kabupaten Bangka Tengah; terbatasnya konektivitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah lain; terjadinya ketimpangan spasial; dan lahan yang tidak produktif. Sedangkan dampak positifnya adalah tidak terjadinya eksploitasi lingkungan.

Kata kunci: *perubahan kebijakan; kawasan strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah, Tanjung Berikat Kabupaten Bangka Tengah*

ABSTRACT

The efforts of the Central Bangka Regency Government to resolve development issues such as backwardness and inequality are to accelerate economic development by planning the Tanjung Berikat Strategic Zone development. The plan has been appointed since 2011 in the Central Bangka Regency Spatial Plan (RTRW) by assigning the Tanjung Berikat Zone as the Regency Strategic Zone (KSK) and the Provincial Strategic Zone (KSP). However, spatial plan revision in 2019, the Tanjung Berikat Zone is no appointed as a KSK. This study aims to identify the factors that affect policy change of Tanjung Berikat Strategic Zone Status in Central Bangka Regency Spatial Plan Revision and describing the indicative implications if the Tanjung Berikat Strategic Zone is not being developed. This study uses a qualitative approach with a deductive qualitative and explorative theorization model.

The results of this study indicate that policy changes of Tanjung Berikat Strategic Zone status in Central Bangka Regency Spatial Plan Revision are affected by changes of regulations and limited authority that causes program failure. These conditions change the opinion of the Central Bangka Regency Government. Other factors are competition, negotiated agreement, superior jurisdiction, political values, and administrative values. If the Tanjung Berikat Strategic Zone is not developed, it is indicated that it will harm the Bangka Belitung Islands Province economy; the development and economy of the Bangka Tengah Regency are lagging; limited connectivity of the Bangka Belitung Islands Province with other regions; spatial inequality and unproductive land. Meanwhile, the positive impact is not the exploitation of the environment.

Keywords: *policy change; strategic zone, spatial plan, Tanjung Berikat Central Bangka Tengah Regency*